

Wujud Nasionalisme Tokoh Modernis Islam: Kontribusi K.H. Mas Mansur dalam Mengantarkan Indonesia Merdeka

Miftahuddin, Dinar Widiyanta, Adnan Rafsanjani*

Program Studi Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Sosial, Hukum, dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Yogyakarta
Jl. Colombo No. 1, Yogyakarta - Indonesia

*Alamat korespondensi: miftahuddin@uny.ac.id

DOI: <https://doi.org/10.14710/jscl.v9i2.43482>

Diterima/Received: 20 Desember 2021; Direvisi/Revised: 30 Desember 2024; Disetujui/Accepted: 30 Desember 2021

Abstract

This study aims to reaffirm the role of K.H. Mas Mansur in the context of Indonesia's struggle for independence from colonial rule. The research employs historical research procedures, including heuristics (source gathering), verification (criticism of the collected sources), interpretation (analysis of historical facts), and historiography (writing of history). The results of this study indicate that K.H. Mas Mansur's contributions to Indonesia's independence were realized both in the fields of social-religious movements to advance Islam and in politics. K.H. Mas Mansur viewed his involvement in social-religious affairs as important, seeing it as a means of empowering society in relation to understanding Islam as a way of life. Similarly, K.H. Mas Mansur believed that achieving an independent Indonesia required the development of political awareness, as resistance against the colonizers would not succeed without this consciousness. The development of the Indonesian Islamic Party (PII), for example, cannot be separated from Mas Mansur's role as a high-ranking leader of Muhammadiyah. In this context, it is clear that, alongside his active participation in the social-religious organization Muhammadiyah and his leadership within it, Mas Mansur was also deeply involved in politics.

Keywords: Independent Indonesia; K.H. Mas Mansur; Modernist; Nationalism.

Abstrak

Kajian ini bertujuan untuk menegaskan kembali peran K.H. Mas Mansur dalam konteks perjuangan mengantarkan rakyat Indonesia merdeka lepas dari penjajahan. Kajian ini menggunakan prosedur penelitian sejarah yang meliputi heuristik (pengumpulan sumber), verifikasi (kritik terhadap sumber-sumber yang telah terhimpun), interpretasi (penafsiran fakta-fakta sejarah), dan historiografi (penulisan sejarah). Hasil kajian ini menunjukkan bahwa kontribusi K.H. Mas Mansur dalam mengantarkan kemerdekaan Indonesia diwujudkan, baik dalam bidang gerakan sosial keagamaan untuk memajukan Islam maupun dalam bidang politik. K.H. Mas Mansur memandang bahwa keterlibatannya dalam bidang sosial keagamaan dianggap penting, karena hal ini sebagai sarana pemberdayaan masyarakat berkaitan dengan pemahaman Islam sebagai pegangan hidup. Demikian pula, K.H. Mas Mansur menganggap bahwa untuk mencapai Indonesia merdeka perlu dibangun kedarasan politik, karena perlawanan terhadap penjajah tidak akan berhasil tanpa adanya kesadaran ini. Perkembangan PII (Partai Islam Indonesia), misalnya, tidak bisa dilepaskan dari peran Mas Mansur sebagai pimpinan tinggi Muhammadiyah. Dalam konteks ini jelas, di samping Mas Mansur aktif dalam organisasi sosial-keagamaan Muhammadiyah dan menjadi orang nomor satu juga terlibat aktif dalam perpolitikan.

Kata kunci: Indonesia Merdeka; K.H. Mas Mansur; Modernis; Nasionalisme.

Pendahuluan

Nasionalis tampaknya tepat untuk menggambarkan sosok K.H. Mas Mansur. Cinta dan pengorbanannya untuk Indonesia dibuktikan dengan melakukan perlawanan terhadap kaum

penjajah sebagai bentuk penentangan atas ketidakadilan. Mas Mansur adalah tokoh yang mewakili golongan modernis dalam gerakan Islam awal abad ke-20. Walaupun K.H. Mas Mansur dalam mengembangkan pemikiran Islam pada awalnya bersama-sama dengan salah satu tokoh

yang mewakili golongan tradisional, yaitu KH. Abdul Wahab Hasbullah, tetapi dalam perjalanan selanjutnya ada perbedaan pandangan. Pada awalnya, K.H. Mas Mansur membentuk majelis diskusi bersama KH. Abdul Wahab Hasbullah yang diberi nama Taswir al-Afkar (Cakrawala Pemikiran). Terbentuknya majelis ini diilhami oleh keadaan masyarakat Surabaya yang diselimuti kabut kekolotan. Masyarakat pada waktu itu sulit untuk diajak maju, bahkan mereka sulit menerima pemikiran baru yang berbeda dengan tradisi yang mereka pegang.

Taswir al-Afkar adalah tempat berkumpulnya para ulama Surabaya, yang sebelumnya mereka mengadakan kegiatan pengajian di rumah-rumah atau di *surau* (langgar) masing-masing. Masalah-masalah yang dibahas dalam perkumpulan ini adalah dari permasalahan keagamaan sampai politik dalam konteks perjuangan melawan penjajah. Pendirian Taswir al-Afkar kemudian mengilhami lahirnya berbagai aktivitas lain di berbagai kota, seperti Nahdlatul Wathan (Kebangkitan Tanah Air) yang menitikberatkan pada pendidikan. Sebagai kelanjutan Nahdlatul Wathan, K.H. Mas Mansur dan KH. Abdul Wahab Hasbullah mendirikan madrasah yang bernama Khitabul Wathan (Mimbar Tanah Air), kemudian madrasah Ahlul Wathan (Keluarga Tanah Air) di Wonokromo, Far'ul Wathan (Cabang Tanah Air) di Gresik, dan Hidayatul Wathan (Petunjuk Tanah Air) di Jombang.

Walaupun K.H. Mas Mansur dan KH. Abdul Wahab Hasbullah pada awalnya bersama-sama dalam memajukan Islam, namun akhirnya keduanya harus berpisah dikarenakan ada perbedaan pola pergerakan Islam. K.H. Mas Mansur masuk dalam golongan yang sering disebut modernis dalam konteks sejarah perkembangan Islam di Indonesia, sedangkan KH. Abdul Wahab Hasbullah masuk golongan yang tetap mempertahankan tradisi. Menurut K.H. Mas Mansur, agama adalah hal yang ringan dan tidak mengikat dan bertujuan untuk membawa rahmat bagi seluruh umat. K.H. Mas Mansur juga berpandangan bahwa Islam seharusnya tanpa

mazhab. Menurutnya, Islam harus langsung dipahami dari sumbernya, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Berbeda dari K.H. Mas Mansur, KH. Abdul Wahab Hasbullah yang mewakili kaum tradisional berpandangan, bahwa ajaran-ajaran terutama mazhab yang empat (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali) haruslah dijaga. Dalam pandangan kaum tradisional, yang dimaksud kembali kepada Al-Quran dan Sunnah bukannya langsung memahami kepada kedua sumber tersebut, akan tetapi perlu merujuk kepada ulama yang diakui mempunyai otoritas. Dengan demikian bermazhab dianggap penting agar agama dapat dipahami dengan baik (Ruslan 2012).

Sebagai seorang ulama dan politikus yang hidup dalam masa penjajahan, baik Belanda maupun Jepang, wajar jika jiwa K.H. Mas Mansur bergulir untuk menjunjung arti kemanusiaan yang diinjak-injak oleh bangsa asing. Kondisi Indonesia yang tidak menentu pada masa penjajahan dan diskriminasi yang begitu kental membuat K.H. Mas Mansur berfikir dan mengambil tindakan untuk menyelamatkan rakyat bumiputera pada umumnya dan umat Islam pada khususnya. Hal itu terbukti dari aktifitas yang dilakukan baik di bidang sosial, keagamaan, maupun politik (Wiriyosukarto 1992, x-xi). Oleh karena itu, peran K.H. Mas Mansur dalam penyelamatan dan mengantarkan rakyat Indonesia Merdeka dari penindasan kaum kolonial menjadi fokus artikel ini.

Kajian tentang K.H. Mas Mansur tampaknya memang sudah banyak dilakukan oleh beberapa peneliti. Hanya saja kajian-kajian yang telah dilakukan kurang menekankan pada porsi yang berkaitan dengan peran K.H. Mas Mansur dalam mengantarkan Indonesia merdeka. Sebagian besar kajian-kajian yang dilakukan berkaitan dengan kontribusi K.H. Mas Mansur dalam Muhammadiyah. Hanafi dan Kuswono (2020), misalnya, dalam artikelnya mengungkap tentang kiprah Mas Mansur dalam perserikatan Muhammadiyah. Berawal sebagai anggota Muhammadiyah, kiprah Mas Mansur kemudian meningkat menjadi ketua cabang Muhammadiyah di Surabaya dan selanjutnya sebagai ketua Umum Muhammadiyah. Sementara itu, dalam usahanya

memurnikan ajaran Islam, perjuangan Mas Mansur adalah pencetus dan pendiri Majelis Tarjih Muhammadiyah.

Kajian Kiptiyah (2018) juga menunjukkan hal yang sama, yaitu kontribusi K.H. Mas Mansur dalam Muhammadiyah berkaitan dengan gagasan kebangsaan dan moderatisme. Ada dua belas langkah Muhammadiyah yang digagas K.H. Mas Mansur. Tujuh di antaranya mengupayakan penguatan spiritual dan persatuan bangsa, yaitu memperdalam masuknya iman, memperluas faham agama, memperbuahkan budi pekerti, menuntun amalan intiqad, menguatkan persatuan, menegakkan keadilan, dan melakukan kebijaksanaan. Sementara itu, lima langkah berikutnya secara khusus diperuntukkan bagi persyarikatan Muhammadiyah sebagai organisasi dakwah yang didorong untuk memelihara persatuan, yaitu menguatkan majlis tanwir, mengadakan konferensi bagian, memusyawarahkan putusan, mengawaskan gerakan dalam, dan mempersambungkan gerakan luar.

Senada dengan Kiptiyah, kajian Lisa dan Muqowim (2021) juga berkaitan dengan gagasan dan perjuangan K.H. Mas Mansur berkaitan dengan *hubbul wathan* (cinta tanah air). Disebutkan bahwa *hubbul wathan* dalam perspektif gagasan dan perjuangan K.H. Mas Mansur yakni berkaitan dengan kepeduliannya akan kebangkitan bangsa, mempersiapkan generasi-generasi penerus bangsa, mengantisipasi perpecahan, menghilangkan sifat bermusuhan, menghentikan pertikaian dan perselisihan, membentuk kekuatan melalui persatuan, melahirkan ide-ide cemerlang yang bermanfaat untuk negara, dan memiliki rasa tanggung jawab akan masa depan dan kesejahteraan bangsanya.

Metode

Sejarah sebagai suatu ilmu merupakan suatu rekonstruksi masa lalu yang terikat pada prosedur atau metode penelitian sejarah (Kuntowijoyo 1999, 12). Metode yang bercorak kesejarahan, menurut Luey (1958, 27-28) adalah suatu sistem

aturan dan prosedur untuk mengumpulkan saksi atau kesaksian dari suatu masa atau peristiwa dan mengevaluasi saksi atau kesaksian tersebut, untuk menyusun fakta-fakta yang terbukti memiliki hubungan kausal, dan akhirnya menghadirkan atau menyajikannya dalam suatu uraian yang bersifat ilmiah.

Pengertian lebih khusus, sebagaimana dikemukakan Garraghan (1957, 33), bahwa metode penelitian sejarah adalah seperangkat aturan dan prinsip sistematis untuk mengumpulkan sumber-sumber sejarah secara efektif, menilainya secara kritis, dan mengajukan sintesis dari hasil-hasil yang dicapai dalam bentuk tertulis. Senada dengan pengertian ini, Gottschalk (1985, 32) menjelaskan metode sejarah adalah sebagai proses menguji dan menganalisis kesaksian sejarah guna menemukan data yang otentik dan dapat dipercaya, serta usaha sintesis atas data semacam itu menjadi kisah sejarah yang dapat dipercaya.

Mengacu pada pengertian di atas, maka implementasi dari langkah-langkah kajian ini mencakup heuristik (pengumpulan sumber sejarah), verifikasi (kritik sumber), interpretasi, dan historiografi. Sumber yang digunakan dalam kajian ini adalah sumber primer berupa arsip dan sumber sekunder seperti buku-buku dan artikel-artikel hasil penelitian. Selanjutnya kritik sumber dilakukan dalam konteks menegaskan tentang kebenaran informasi yang terkandung di dalamnya dalam rangka mendapatkan fakta-fakta yang kredibel atau dapat dipercaya. Fakta-fakta yang diperoleh sesuai dengan tema selanjutnya diinterpretasi baik secara analitis maupun sintesis untuk memperoleh keterkaitan antara fakta yang satu dengan fakta lainnya. Yang terakhir, fakta-fakta yang telah terkumpul dan saling terkait tersebut dilakukan penyusunan secara kronologis untuk mendapatkan cerita sejarah (historiografi).

Geneologi Intelektual K.H. Mas Mansur

K.H. Mas Mansur dilahirkan pada hari Kamis malam tanggal 25 Juni 1896 M di Surabaya, tepatnya di kampung Sawahan (Anis, 14). Kampung ini sekarang bernama kampung Kalimas

Udik III. Ibunya bernama Raulah, seorang wanita kaya berasal dari keluarga pesantren Sidoresmo, Wonokromo, Surabaya. Ayah Mas Mansur bernama KH. Mas Ahmad Marzuki, seorang pionir Islam, ahli agama yang terkenal di Jawa Timur. KH. Mas Ahmad Marzuki berasal dari keturunan bangsawan Astatinggi Sumenep Madura. Semasa hidupnya KH. Mas Ahmad Marzuki dikenal sebagai imam tetap dan khatib di Masjid Agung Ampel Surabaya (Said, 5). Dapat dilihat, bahwa dari garis keturunan ibu Mas Mansur berasal dari keturunan ulama, sedangkan kalau dilihat dari pihak ayah, Mas Mansur berasal dari kalangan ulama dan bangsawan yang terhormat dan terpadang. Keduanya berasal dari keluarga muslim yang taat, sehingga tidak mustahil apabila Mas Mansur menjadi ulama yang mempunyai ilmu yang luas.

Jika mengikuti periodisasi sejarah Indonesia yang disajikan oleh Bernard Dahm, Mas Mansur termasuk tokoh dari generasi yang lahir pada fase pertama dalam pembabakan sejarah modern Indonesia, yaitu generasi yang lahir pada akhir abad ke-19. Pada umumnya generasi fase ini pernah mengenyam pendidikan di Belanda atau di Timur Tengah. Sementara itu, Mas Mansur termasuk ke dalam tokoh yang memperoleh pendidikan di Timur Tengah (Dahm 1971, 10).

Pendidikan pertama yang diterima Mas Mansur tentu saja dari ayahnya di Pesantren Sawahan. Akan tetapi ada pula yang mengatakan bahwa sebelumnya dia juga sudah pernah belajar di pesantren Sidoresmo. Di pesantren Sidoresmo ini, Mas Mansur belajar ilmu *Nahwu* (tata bahasa Arab) dan *Sharaf* (perubahan bentuk dan makna dari bahasa Arab). Setelah memperoleh dasar-dasar ilmu agama dari ayahnya dan dari Kiai Mas Thoha sebagai pengasuh pondok Sidoresmo, pada tahun 1906 Mas Mansur dikirim belajar ke Pesantren Kademangan di Bangkalan Madura. Pesantren ini dipimpin oleh Kiai Haji Kholil, seorang kiai yang masyhur di Jawa dan Madura pada akhir abad 19 dan awal abad ke-20. Meskipun Kiai Kholil ini tidak memimpin sebuah tarekat, di Jawa dia dikenal sebagai seorang wali yang piawai di bidang *Nahwu*, Sastra Arab, *Fiqh*, serta *Tasawuf*.

Hampir semua kiai besar di abad 20 pernah menjadi santrinya (Soebagijo 1982, 19).

Pada tahun 1908, Mas Mansur pergi belajar ke Mekah bersama dengan KH. Muhammad dan KH. Hasbullah. Akan tetapi, tidak diperoleh keterangan yang jelas kepada siapa dan di mana saja Mas Mansur belajar selama di Mekah. Hanya saja, saat itu di Mekah ada seorang yang terkenal, bernama Syeikh Ahmad Khatib, sehingga ada kemungkinan Mas Mansur pernah berguru pada Syeikh ini. Pada tahun 1910 timbul pergolakan politik di wilayah Hijaz, yang memicu orang-orang asing ikut terlibat dalam sengketa politik tersebut. Penguasa Mekah saat itu, Syarif Husein, memerintahkan kepada segenap orang asing untuk segera menyingkir atau meninggalkan kota suci itu. Sementara itu, Mas Mansur karena baru dua tahun mengenyam pendidikan di Mekah, maka harus dihadapkan pada dua pilihan, yakni terus menuntut ilmu atau kembali ke tanah air. Akhirnya, Mas Mansur memilih untuk terus menuntut ilmu (Said, 5-6).

Setelah menentukan pilihan, Mas Mansur kemudian memilih untuk melanjutkan studinya ke Universitas Al-Azhar di Kairo. Selain etos belajar yang telah diterimanya di pesantren, agaknya ada beberapa hal yang mendorong minatnya untuk pergi ke Kairo. Sebagai santri setidaknya ia ingin mengetahui dan melihat secara langsung perguruan tinggi yang didirikan oleh Dinasti Fatimiyyah pada abad ke-10 Masehi dan yang termasyhur sebagai pusat ilmu pengetahuan dan peradaban Islam saat itu (Said, 7).

Kota Kairo diketahui adalah pusat gerakan nasional Mesir serta tempat pelarian para nasionalis dari negeri-negeri Islam lainnya. Di tempat ini para mahasiswa dari Asia Tenggara, tidak hanya mempersiapkan diri untuk menjadi guru dan pembaharu agama Islam, tetapi juga mulai aktif menyebarkan cita-cita mereka lewat penerbitan majalah, seperti *Seruan Ashar* dan *Pilihan Timur*. Kedua majalah ini segera dilarang di Hindia Belanda, tetapi memperoleh pembaca luas di Tanah Semenanjung. Selain itu, banyak pula bekas murid-murid Syeikh Ahmad Khatib, terutama berasal dari Minangkabau, belajar di

Universitas tertua di dunia itu. Sepulang belajar dari Al-Azhar, mereka umumnya aktif dan bahkan menjadi tokoh dalam gerakan di Tanah Air. Sementara itu, Mas Mansur tampaknya hendak mengikuti jejak langkah kakak-kakak seperguruannya di Mekkah tersebut (Said, 9).

Niat Mas Mansur untuk pergi belajar ke Kairo itu segera dinyatakannya dalam sepucuk surat yang dilayangkan kepada ayahnya di Surabaya, tetapi sang ayah rupanya tidak memberinya izin. Ayah Mas Mansur, KH. Mas Ahmad Marzuki, beranggapan bahwa Kairo bukanlah tempat yang baik untuk belajar, karena kota itu merupakan tempat plesiran dan maksiat belaka, dan dia curiga Mas Mansur akan tergiur untuk ikut berfoya-foya. Namun itu bukan satu-satunya alasan, ada pula faktor lain yang agaknya membuat KH. Mas Ahmad Marzuki khawatir, yaitu adanya pergerakan pembaharuan dan timbulnya pergolakan politik di Mesir pada saat itu. Akan tetapi, tekad Mas Mansur yang sudah bulat tidak mengindahkan larangan dari ayahnya. Walaupun ada ancaman dari ayahnya yang akan penghentikan uang kiriman, tetapi tidak membuat tekad Mas Mansur surut. Mas Mansur akhirnya berangkat juga ke Kairo dengan modal nekat dan semangat menuntut ilmu. Setelah diterima di Universitas Al-Azhar, Mas Mansur memilih belajar di Fakultas Al-Din (Ilmu Agama) yang mempelajari ilmu-ilmu *Ubudiyah* dan *Siyasatul Islamiyah*. Selama belajar di Al-Azhar, Mas Mansur tinggal bersama para siswa lainnya yang berasal dari Melayu di ruang *Ruaq* Al-Malayu, asrama mahasiswa Melayu. Selama menjadi mahasiswa, Mas Mansur sempat bertemu dengan Syeikh Rasyid Ridha, seorang murid Syeikh Muhammad Abduh (Aqsha 2005, 26-27).

Sebagai mahasiswa yang haus akan ilmu dan pengalaman, Mas Mansur tidak menyia-nyiaikan kesempatan untuk memanfaatkan buku-buku di perpustakaan universitas. Selain membaca buku-buku agama dan sastra Arab, dia melahap pula buku-buku ilmu pengetahuan umum, termasuk karya-karya filsafat dan sastra Barat yang telah banyak diterjemahkan ke dalam bahasa Arab saat itu. Sebagaimana diketahui, Mesir adalah satu-

satunya negeri Arab yang telah lama akrab dengan bangsa Barat. Mas Mansur tidak saja menghabiskan waktunya untuk belajar di Mesir, dia juga aktif di dalam perhimpunan siswa-siswa Melayu yang telah lama berdiri, yaitu bernama Jam'iyatul Khairiyatul Malawiyah, walaupun tidak lama bergabung dalam organisasi itu. Selanjutnya, pada tahun 1912 dia bersama kawan-kawannya memisahkan diri dari organisasi itu dan kemudian mendirikan organisasi Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) di Kairo (Aqsha 2005, 28).

Pada awal Agustus 1914, ketika PD (Perang Dunia) I pecah, Mas Mansur masih berada di Kairo. Bulan Oktober 1914 Inggris menguasai Mesir dan menyatakan perang kepada kesultanan Ottoman. Dengan penguasaan tersebut, akhirnya Mesir dinyatakan sebagai protektorat Inggris. Raja Mesir saat itu Khedive Abbas Hilmi II digantikan oleh Husein Kamil yang diberi gelar sultan oleh pemerintah Inggris. Situasi perang sangat berpengaruh bagi kehidupan sosial-ekonomi Mesir, terutama bagi rakyat jelata. Situasi demikian bukan mustahil bisa mengganggu ketenangan belajar dan bahkan bisa pula mengancam keselamatan diri Mas Mansur jika masih bertahan di Mesir. Karena alasan itu, kemudian pada tahun 1915 Mas Mansur meninggalkan Kairo menuju Mekkah dengan harapan bisa terus melanjutkan pelajarannya, namun situasi di kota suci ini pun tidak jauh berbeda dengan Kairo (Wiriyosukarto 1992, 141).

K.H. Mas Mansur, Nasionalisme, dan Partai Politik

Perjuangan Mas Mansur dalam membangkitkan kesadaran kebangsaan tampak sejak aktif dalam SI dan kemudian membentuk Taswirul Afkar dan Madrasah Nahdlatul Wathan. Dalam lembaga yang disebut terakhir, dia berperan banyak dalam menebarkan benih-benih nasionalisme di kalangan kaum muda Islam serta anak didiknya yang kelak akan meneruskan perjuangan mencapai cita-cita kemerdekaan. *Nahdlatul Wathan* yang dalam bahasa Indonesia berarti "Kebangkitan Tanah Air" memberi kesan betapa kuatnya semangat cinta tanah air dan kebangsaan kaum santri itu. Sewaktu masih bersama-sama memimpin madrasah

tersebut dengan Wahab Hasbullah, bahkan Mas Mansur sempat menggubah sebuah sajak dalam bahasa Arab bertemakan patriotisme. Sajak Nahdlatul Wathan ini juga kemudian digubah ke dalam sebuah lagu dan merupakan lagu wajib bagi para murid sebelum memulai kegiatan pembelajaran. Gubahan ini terus berkumandang di berbagai pelosok dengan berbagai variasi nada yang menggugah semangat kebangsaan kalangan santri. Hingga tahun 1940an para santri pesantren Tebu Ireng Jombang, masih sering menyanyikannya sebelum mengawali pelajaran dengan sikap berdiri, seperti menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya (Anam 1999, 8).

Dalam bidang sosial keagamaan, pertemuan Mas Mansur beberapa kali dengan Ahmad Dahlan memberikan pengaruh yang besar dalam pemikirannya. Ahmad Dahlan saat itu memberikan pencerahan dan kesadaran dalam diri Mas Mansur tentang perlunya suatu metode pendekatan dalam upaya membina suatu masyarakat yang sesuai dengan kehendak Allah dan Rasul-Nya. Metode yang dianjurkan Ahmad Dahlan adalah melakukan pengkajian dan pengamalan isi Al-Quran dengan menggunakan otak dan mata hati hingga tersingkap rahasia alam yang memang diciptakan Tuhan untuk semua makhluknya, termasuk manusia. "Kita hidup di dunia, maka dari itu kita harus tahu pula akan apa-apa yang terjadi di sekeliling tempat kita hidup itu," kata Ahmad Dahlan (Wiriyosukarto 1992, 142).

Mas Mansur juga tertarik dalam bidang jurnalistik yang dimanfaatkannya sebagai alat untuk menyebarluaskan berbagai gagasan dan pemikirannya kepada masyarakat di dalam upaya mewujudkan cita-citanya. Media komunikasi pertama yang diterbitkan Mas Mansur adalah *Le Jinem*, pada tahun 1920 di Surabaya. Kemudian, dia menerbitkan majalah *Suara Santri* (1921), serta *Jurnal Etude* dan *Prietair*, yang semuanya membawakan suara kaum santri Surabaya. *Le Jinem* maupun *Suara Santri* dijadikan Mas Mansur sebagai tempat untuk menumpahkan segenap isi hati dan cita-citanya berkenaan dengan perbaikan nasib umat dan bangsa. Bahasanya yang singkat padat dan mudah dipahami membuat Mas Mansur

mempunyai reputasi yang tinggi dalam bidang jurnalistik. Mas Mansur sempat menjadi redaktur dalam majalah *Kawan Kita Yang Tulus* di Surabaya, dan juga sempat menjadi pimpinan umum *Suara Muslimin Indonesia* ketika Masyumi terbentuk pada akhir 1943 (Said, 38).

Diketahui aktifitas Mas Mansur dalam pergerakan keagamaan diawali dengan membentuk kelompok diskusi *Taswirul Afkar* pada tahun 1916 di Surabaya bersama beberapa kiai muda, seperti KH. Abdul Wahab Hasbullah dan KH. Ahmad Dahlan. Kelompok diskusi ini bertujuan untuk memajukan umat Islam, terutama kaum pemuda dengan memancing mereka untuk menambah pengetahuan melalui perdebatan-perdebatan (Dhofier 1984, 27). Dari disukusi itu kemudian memunculkan gagasan untuk mendirikan sebuah madrasah yang bertujuan menanamkan serta membangkitkan semangat patriotisme dan nasionalisme anak didik yang dijiwai oleh nilai-nilai Islam. Setelah berdiri, madrasah itu kemudian diberi nama *Nahdlatul Wathan* atau kebangkitan tanah air. Madrasah tersebut selanjutnya menunjuk Mas Mansur sebagai kepala sekolahnya. Dia dibantu oleh KH. Mas Alwi, saudara sepupunya, sedangkan KH. Ridwan, KH. Wahab Hasbullah ditunjuk sebagai dewan guru, dan KH. Abdul Kahar sebagai direktornya (Halim 1970, 8-9).

Perkembangan kelompok diskusi dan madrasah ternyata mendapat sambutan yang baik dari masyarakat, namun tidak bagi tokoh-tokohnya. Pada saat itu, di antara tokoh-tokoh pendiri kelompok ini mulai terjadi perdebatan yang bersifat prinsipil, salah satu perdebatan yang berakibat panjang, yaitu perdebatan antara Mas Mansur dan Wahab Hasbullah mengenai perlu tidaknya tarekat dan bermazhab dalam praktik berislam. Perdebatan ini semakin menjadi setelah Surabaya kedatangan ulama-ulama pembaharu, di antaranya ialah KH. Ahmad Dahlan, A. Hassan, Ahmad Soerkati, dan Umar Hubeisy (Noer 1990, 88). Mereka mengkritisi praktek peribadatan yang mengandung unsur-unsur bid'ah, khurafat, dan taklid, serta menyerukan agar terus mengkaji dan

mengamalkan isi sumber aslinya, yaitu Al-Quran dan Sunnah (Raharjo 1983, 178).

Aktifitas ini mengundang reaksi keras dari kalangan ulama tradisional. Mereka menyebut Mas Mansur sebagai pengikut Wahabi dan bahkan menyebut Mas Mansur telah mendirikan agama baru yang mereka sebut agama Mansur. Dhofier (1984, 27) menyimpulkan bahwa perdebatan ini merupakan awal pengelompokan umat Islam di Jawa ke dalam apa yang disebut “kelompok Islam Tradisionalis” dan “kelompok Islam Modernis.” Sejak saat itulah tampak gejala perpisahan antara Mas Mansur dengan Wahab Hasbullah.

Pada tahun 1920, bersama Fakih Hasyim dan Haji Ali yang sepaham, Mas Mansur membentuk Ihya Al-Sunnah. Kelompok diskusi agama dan pendidikan ini rupanya menarik Cokroaminoto. Kemudian Mas Mansur dan Cokroaminoto mendirikan Ta'mirul Gofilin, sebuah forum dakwah yang dikoordinir sendiri oleh Cokroaminoto (Aqsha 2005, 53). Melalui forum ini Cokroaminoto kerap kali mengundang KH. Ahmad Dahlan untuk memberikan pengajian di rumahnya, Surabaya. Tidak sedikit tokoh pergerakan yang menghadiri forum pengajian itu. Di sinilah Bung Karno dan Roeslan Abdulgani muda untuk pertama kalinya memperoleh penjelasan yang menurutnya benar tentang Islam (Departemen Penerangan RI 1962, 13).

Setahun kemudian, tepatnya tanggal 17 April 1921, Ihya Al-Sunnah mengadakan suatu pertemuan yang dihadiri KH. Ahmad Dahlan. Dalam pertemuan itu diputuskan bahwa Ihya Al-Sunnah akan menjadi cabang Muhammadiyah beberapa hari kemudian. Sementara itu, surat kabar Oetoesan Hindia terbitan 27 April 1921 melaporkan Muhammadiyah Cabang Surabaya berdiri (Alfian 1969, 266). Dalam kesempatan itu Mas Mansur terpilih sebagai ketua umumnya, dan ini berarti Muhammadiyah Surabaya menjadi cabang kelima sejak Muhammadiyah berdiri pada tahun 1912 (Departemen Penerangan RI 1962, 164).

Pada tahun 1922, Mas Mansur mengundurkan diri dari Madrasah Nahdhatul Wathan. Pengunduran ini dikarenakan,

sebagaimana telah disinggung, akibat berbeda pendapat dengan Wahab Hasbullah mengenai metode pengajaran dan persoalan furu'iyah. Dia kemudian berniat mendirikan sebuah madrasah baru, tetapi tidak mempunyai tanah untuk mendirikan bangunannya. Kemudian Mas Mansur melirik kandang kambing yang terletak di sebelah timur pondok pesantren ayahnya. Ditemuilah ayahnya untuk menyatakan niatnya itu, dan sang ayah pun merestunya. Di atas tanah bekas kandang kambing yang berbentuk tegak lurus itu dibangunlah beberapa ruang kelas, ruang kantor, dan kamar mandi. Pada hari Sabtu tanggal 3 Muharram 1340 H, atau 26 Agustus 1922 diresmikanlah sebuah madrasah yang diberi nama Hizbul Wathan, meminjam nama organisasi kepanduan Muhammadiyah yang didirikan pada 1918, tetapi tak lama kemudian nama itu digantinya dengan Mufidah. Madrasah ini bertujuan membentuk manusia muslim berahlak mulia dan percaya pada diri sendiri (Aqsha 2005, 54).

Mas Mansur setiap harinya memiliki jadwal mengajar yang cukup padat. Dia mulai bekerja dari lepas subuh hingga jauh malam dan diselingi istirahat siang hari, karena dia mengajar di dua lembaga; yakni pesantren ayahnya dan madrasahnyanya, ditambah lagi dengan pengajaran-pengajaran yang diadakan atas inisiatifnya sendiri. Kegiatan yang terakhir ini biasanya dilakukan setelah sholat Subuh, Asar, dan Isya, dengan menggunakan bahasa Jawa dialek Surabaya dan bahasa Melayu. Adapun jadwal pelajaran Madrasah dibagi menjadi dua, dari jam 8 hingga 12 pagi untuk siswa, dan dari jam 14 hingga 16 siang untuk siswi. Mata pelajaran yang diberikan adalah *nahwu, sharaf, tauhid, fiqh, tarikh, tajwid, tahsinul khat, tafsir, hadist*, dan akhlak. Sementara itu, pelajaran pengetahuan umumnya adalah berhitung, menyanyi, menggambar, bahasa Indonesia, bahasa daerah, bahasa Belanda, dan bahasa Inggris (Aqsha 2005, 55).

Sementara pada tahun 1920-an memang merupakan tahun-tahun krisis bagi Islam di Hindia, akibat dari pemberontakan Partai Komunis Indonesia (PKI) yang gagal di beberapa daerah, antara tahun 1926 sampai 1927 (Nasution 1981, 91). Pemerintah kolonial Belanda melancarkan politik “Rush en Orde” (aman dan tertib) yang

begitu menekan seluruh gerakan politik di Hindia Belanda. Politik ini memaksa organisasi-organisasi nasionalis radikal dan para pemimpinnya untuk tidak berpolitik langsung di dalam masyarakat. Tokoh-tokoh radikal seperti Soekarno, Hatta, dan Syahrir dipenjarakan dan diasingkan. Banyak pula para pemimpin Islam, kiai, haji, dan ustadz yang menjadi buruan pemerintah Hindia Belanda, karena dianggap ikut berperan dalam mengobarkan serangkaian pemberontakan (Pringgodigdo 1984, 54).

Namun tindakan represif dari pemerintah ini menimbulkan dampak positif bagi gerakan-gerakan non-politik dan moderat, termasuk Muhammadiyah yang sempat menyebar ke luar Jawa. Mas Mansur yang memimpin Muhammadiyah cabang Surabaya berusaha pula mengatasi krisis dengan mengundang segenap anggota dan pengurusnya membahas nasib organisasi di kediamannya. Pertemuan yang berlangsung pada tanggal 1 Juli 1927 ini kemudian menjadi proses seleksi bagi anggota dan pengurus Muhammadiyah Surabaya. Disebut proses seleksi karena hadirin yang tetap bertahan dalam pertemuan tersebut hingga larut malam ternyata tinggal 20 orang saja (Anwar 1971, 30-31). Tindakan penyelamatan yang memanfaatkan momentum tahun baru Hijriyah ini berhasil memulihkan kehidupan organisasi dan bahkan kemajuan yang dicapai melebihi masa-masa sebelumnya. Hal ini terlihat dari pendapatan Muhammadiyah Surabaya pada tahun 1932 yang tercatat mencapai f. 19.069 (Pasha 2005, 76).

Keberhasilan ini mengundang perhatian dan simpati KH. Hisyam, ketua umum Hoofdbestuur Muhammadiyah di Yogyakarta. Hisyam yang dikenal banyak menaruh perhatian di bidang sosial dan pendidikan ini kemudian menetapkan Mas Mansur sebagai konsul Muhammadiyah daerah Jawa Timur dengan masa tugas selama tiga tahun. Penetapan ini dilakukan berdasarkan Beslit yang ditandatangani oleh Kiai Hisyam sendiri tertanggal 17 Maret 1935 (Surat Keputusan dan Instruksi Hoofdbestuur Muhammadiyah, Yogyakarta, 1935).

Peran K.H. Mas Mansur Masa Pergerakan Kebangsaan

Pada tahun 1915, setibanya dari pengembaraannya menuntut ilmu di Hijaz dan Mesir, Mas Mansur menjumpai kota kelahirannya, Surabaya dalam suasana penuh hiruk-pikuk oleh semangat kebangsaan kaum revolusioner. Bung Karno yang sempat indekos beberapa lama di rumah Cokroaminoto di kawasan Paneleh melukiskan situasi Surabaya saat itu sebagai kota pelabuhan yang sibuk dan ribut, lebih menyerupai kota New York (Abdulgani 1985). Di kota inilah Cokroaminoto memimpin *Central* Sarikat Islam (CSI) yang terkenal dengan aksi-aksi radikalnya. Dalam suasana kota yang marak seperti itulah Mas Mansur memilih CSI sebagai lahan pengabdianya di bidang politik (Wirjosukarto 1968, 34).

Tidak berhenti sampai di situ saja, setelah bergabung dengan CSI, Mas Mansur kemudian ikut bergabung pula dengan *Indonesische Studie Club* (ISC) yang didirikan di Surabaya pada 11 Juli 1924 sebagai penjelmaan *Intelectuele Club* (Kutoyo 1976, 17). ISC yang dipimpin Dr. Soetomo bertujuan untuk membangunkan kaum terpelajar supaya mempunyai kesadaran kewajiban terhadap masyarakat dan memperdalam pengetahuannya tentang politik (Pringgodigdo 1984, 128).

Sementara itu, Partai Sarikat Islam sejak melancarkan politik hijrahnya yang non-kooperatif dan menjatuhkan disiplin partai kepada sejumlah anggotanya pada 1927 mengalami keretakan di dalam tubuhnya, dan reputasinya sebagai partai besar kian merosot. Sejumlah tokoh keras yang menentang politik partainya mengundurkan diri dan membentuk partai sendiri. H. Agus Salim, misalnya, mendirikan Barisan Penyadar dan Dr. Sukiman dengan Partai Islam Indonesia-nya, namun sayang kedua partai ini tidak bisa menarik banyak anggota. Ketika Dr. Sukiman bertemu dengan Mas Mansur yang terkena disiplin partai terdapat persamaan ide untuk mempertahankan serta menaikan pamor partai Islam pertama di Hindia Belanda itu dengan kembali masuk menjadi anggotanya. Untuk itu, Mas Mansur, Sukiman, Wali al-Fattah, dan beberapa tokoh lainnya melayangkan sepucuk surat kepada pengurus besar partai, yang sejak 1929 namanya diganti Partai Sarikat Islam Indonesia (PSII). Dalam surat itu dijelaskan bahwa mereka akan masuk PSII dengan mengajukan persyaratan agar partai tersebut:

pertama, mau melepaskan azas hijrahnya, yakni sikap menarik diri atau menolak bekerja sama dengan pihak pemerintah, karena hijrah tidak bisa dijadikan sebagai azas perjuangan tetapi sekedar taktik. Kedua, hanya bergiat di bidang politik. Ketiga, segera mencabut disiplin partainya terhadap Muhammadiyah (Hadikusumo 2010, 55-56).

Namun demikian, PSII menolak semua persyaratan itu, kecuali soal disiplin partai terhadap Muhammadiyah. Atas penolakan itu, mereka kemudian memikirkan perlunya sebuah partai Islam baru yang kooperatif dan sesuai dengan aspirasi mereka. Aspirasi ini ternyata sejalan dengan aspirasi beberapa anggota Islam Studie Club yang menginginkan agar gerak kelompok diskusi itu diperluas meliputi bidang politik. Oleh karena itu, pada tanggal 4 Desember 1938, di rumah Dr. Satiman (adik Dr. Sukiman), Solo, dibentuklah sebuah partai bernama Partai Islam Indonesia (PII) yang diketuai oleh R. Wiwoho Purbohadijoyo. Dalam partai baru ini Mas Mansur sendiri duduk sebagai anggota (Pringgodigdo 1984, 131-132).

Terbentuknya PII dengan dilandasi kesadaran berpolitik di kalangan umat Islam Hindia Belanda adalah penting untuk melihat perkembangan situasi sosial-politik, baik di dalam maupun luar negeri. Kehadiran PII ini setidaknya cukup melegakan sebagian umat Islam yang sudah lama mendambakan sebuah partai sendiri yang kooperatif dan inspiratif. Setahun setelah berdirinya PII, Mas Mansur langsung menjadi anggota MIAI dan untuk pertama kalinya mengikuti kongres Al-Islam II pada awal Mei 1939 di Solo. Partai ini dengan serta merta berkembang pesat ke seluruh penjuru tanah air karena ditunjang oleh tokoh-tokohnya dan majalah Islam Bergerak yang memperoleh banyak simpati dari umat Islam. Perkembangan PII yang sedemikian pesat ini tentunya tidak bisa dilepaskan dari peran Mas Mansur sebagai pucuk pimpinan Muhammadiyah dan enam dari dua belas anggota pengurusnya yang berasal dari Muhammadiyah (Soebagijo 1982, 36). Kesadaran politik Mas Mansur ini dianggap suatu langkah pembaharuan dalam gerakan yang selama ini phobia terhadap apa yang disebut politik. Berperannya pimpinan Muhammadiyah di dalam kepengurusan PII menimbulkan pertentangan

pendapat dalam gerakan sosial-keagamaan tersebut. Sebagian mengkritik partisipasi aktif Mas Mansur dan beberapa tokoh lainnya dalam politik yang telah berada di luar garis dan bisa merusak organisasi. Kartosudarmo, Konsul Muhammadiyah Jawa Barat, misalnya, dan majalah Pancaran Amal Jakarta menilai berpolitiknya Mas Mansur akan menimbulkan perpecahan di kalangan Muhammadiyah dan membahayakan organisasi. Mas Mansur berusaha membela diri dari gelombang kritik dan protes dengan menjelaskan bahwa Muhammadiyah tidak memiliki disiplin atau peraturan yang melarang anggota-anggotanya atau pemimpinnya untuk bergabung dengan partai atau organisasi politik. Demikian pula, berperannya orang-orang Muhammadiyah di dalam PII adalah atas nama pilihan pribadi mereka sendiri dan tidak mengatasnamakan organisasi. Selanjutnya dikatakan, adanya partai politik Islam yang kooperatif memang diperlukan, guna memberikan pendidikan politik kepada umat yang enggan tahu tentang dunia politik (Soebagijo 1982, 37).

Isu ini menarik perhatian para konsul Muhammadiyah untuk mengadakan konferensi di Kudus, 7-9 April 1939. Konferensi memutuskan bahwa tak seorang pun pimpinan Muhammadiyah bisa ambil bagian aktif sebagai pimpinan di dalam partai atau organisasi politik lainnya selama ia masih melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam Muhammadiyah. Kendati keputusan ini sempat meredakan gelombang kritik terhadap keterlibatan Mas Mansur dalam politik, gelombang itu muncul lagi dari waktu ke waktu, namun bagai "anjing menggonggong kafilah berlalu," Mas Mansur terus saja aktif berjuang di bidang politik (Hadikusumo 2010, 58). Bahkan Bung Karno dalam pengasingannya di Bengkulu mendukung sikap Mas Mansur. Di depan konferensi Muhammadiyah se-Sumatera yang dihadiri Mas Mansur selaku Ketua Umum Pengurus Besar Muhammadiyah, 5 April 1941, Bung Karno antara lain berkata

"Saya mengetahui bahwa kakanda dicerca, dimaki, disangka jahat, malahan ada pula yang mengadakan aksi yang terang-terangan dan underground menghalangi kakanda untuk dipilih kembali sebagai *voorzitter* H.B.

Muhammadiyah. Demikianlah nasib pemimpin, inilah ukurannya. Terusanlah kakanda punya aksi. Sukarno berdiri di belakang kakanda” (Said, 20).

Enam bulan setelah PII berdiri, Mas Mansur dan R. Wiwoho mewakili partai tersebut untuk mendirikan Gabungan Politik Indonesia (GAPI) bersama kaum pergerakan kebangsaan di Jakarta pada 29 Mei 1939 (Poesponegoro 1993, 90). Berdirinya GAPI selain dimaksudkan untuk mempersatukan partai politik di Hindia Belanda, juga mempunyai tujuan pokok, yaitu menuntut agar Hindia Belanda berparlemen (Poesponegoro 1993, 90). PII memberikan dukungan penuh terhadap tuntutan GAPI berdasarkan prinsip musyawarah yang diajarkan Al-Qur’an. PII, dalam kongresnya yang pertama di Yogyakarta pada 11 April 1940, mencetuskan beberapa program yang menyangkut berbagai kepentingan rakyat Hindia Belanda, meliputi masalah-masalah politik, agama, ekonomi, perpajakan, sosial, pengajaran, dan kehakiman. Salah satu program PII yang paling menarik dan relevan dengan apa yang diperjuangkan bangsa pribumi saat itu adalah programnya di bidang politik, yaitu mengadakan sebuah Negara Kesatuan Indonesia di bawah suatu pemerintahan pusat yang demokratis. Dalam kongres ini Mas Mansur diminta menjadi penasehat pengurus PII yang baru, sedangkan ketua terpilih adalah Dr. Sukiman (Pringgodigdo 1984, 132-133).

Kemudian, pada bulan September 1940, Mas Mansur mewakili MIAI duduk dalam Dewan Pimpinan Majelis Rakyat Indonesia (MRI) bersama KH. Wahid Hasyim, Wondoamoseno, Dr. Sukiman, dan Umar Hubeisy. MRI adalah sebuah badan perwakilan rakyat Indonesia yang bertujuan mencapai kesentosaan dan kemuliaan rakyat berdasarkan demokrasi menggantikan peranan Kongres Rakyat Indonesia. Majelis ini dipimpin oleh suatu badan pengurus yang disebut Dewan Pimpinan yang terdiri dari wakil federasi-federasi besar yang anggotanya sebagian besar menjadi anggota Majelis tersebut, yaitu: GAPI, MIAI, dan PVPN (Persatuan Vakvonden Pegawai Negeri) (Pringgodigdo 1984, 149-150).

Pada tanggal 16 November 1941, Dewan Pimpinan MRI yang beranggotakan 15 orang mengadakan rapat. Dalam rapat itu diputuskan

bahwa MRI akan memilih pengurus harian yang terdiri dari tiga orang dengan masa tugas hingga kongres MRI yang akan diadakan pada bulan Mei 1942 (Pringgodigdo 1984, 149-150). Pada acara pemilihan ketua MRI, ternyata suara yang masuk sebagian besar (80%) memilih Mas Mansur. Terpilihnya Mas Mansur dianggap sebagai pengakuan atas kepemimpinan Mas Mansur di kalangan nasionalis. Mas Mansur sendiri ternyata tidak bersedia mengemban kepercayaan kongres tersebut dengan alasan bahwa ia lebih mencintai Muhammadiyah yang disebutnya sebagai *mboktuwo* itu (Soebagijo 1982, 14). Kongres akhirnya memilih Mr. Sartono sebagai ketua MRI, Sukarjo Wiryopranoto sebagai sekretaris, dan Atik Suardi sebagai bendahara. Majelis ini tidak berusia lama, hanya sekitar tiga bulan, lantaran PSII mengundurkan diri baik dari GAPI maupun dari MRI. Pengunduran diri PSII ini dilakukan atas pertimbangan bahwa dua orang pengurus harian MRI, Sartono dan Sukarjo, telah bertindak di luar garis yang sudah ditetapkan bersama, yakni menerbitkan sebuah surat edaran MRI dan GAPI yang berisi pernyataan setia pada pemerintah untuk mempertahankan keamanan dan ketertiban (Aqsha 2005, 71).

Peran K.H. Mas Mansur Masa Pendudukan Jepang

Ketika Jepang baru seminggu menduduki Hindia Belanda, nama Mas Mansur muncul sebagai Menteri Agama dalam daftar susunan kabinet Indonesia yang diajukan Abikusno Cokrosuyoso kepada penguasa pendudukan. Ulah Cokrosuyoso bisa jadi merupakan hanya sekedar candaan karena Cokrosuyoso mengetahui sifat pemerintahan yang fasis, dan memang usulan tersebut nasibnya sama dengan yang diprediksi oleh penggagasnya yakni ditolak mentah-mentah oleh Jepang yang sejak semula tak berniat membebaskan Hindia Belanda sepenuhnya (Soebagijo 1982, 62-63).

Mas Mansur sendiri sejak bulan Agustus 1942 telah dipanggil *Gunseikan* (Kepala Pemerintahan Militer) ke Jakarta, pemanggilan ini berkaitan dengan rencana pemerintah militer Jepang untuk menanamkan pengaruhnya di Hindia Belanda. Jepang merencanakan untuk berhubungan lebih dekat lagi kepada para

pemimpin masyarakat di Hindia Belanda agar bisa memberikan motivasi kepada rakyat untuk ikut berperan dalam mengerahkan baik dana maupun tenaganya. Oleh karena itu, Kolonel Fujima selaku Panglima Angkatan Darat Jepang di Sumatera menemui Bung Karno yang sedang ditahan di Padang dan merundingkan nasib Hindia Belanda selanjutnya. Demikian pula Bung Hatta, ia dibebaskan Jepang dari tahanan Sukabumi dan ditempatkan di Badan Penasihat Umum Angkatan Darat (Soedarno 1982, 7). Mas Mansur pada masa ini juga mendapat bujukan dari Bung Karno untuk ikut membantu merumuskan nasib bangsanya, walaupun awalnya menolak ajakan itu dengan alasan ingin mengundurkan diri dari arena politik dan juga berniat untuk kembali ke Surabaya untuk mengejar dan mengadakan kaderisasi di madrasah dan pesantrennya. Akhirnya, Mas Mansur menerima ajakan tersebut karena dia merasa bertanggungjawab terhadap keselamatan bangsanya (Said, 21).

Pada tanggal 9 Maret 1943, Mas Mansur bersama Bung Karno, Bung Hatta, dan Ki Hadjar Dewantara yang dijuluki empat serangkai menduduki posisi kunci dalam gerakan Putera (Pusat Tenaga Rakyat) yang diresmikan Gunseikan di Lapangan Ikada, Jakarta (Hatta 1971, 29-30). Dalam rapat itu, Mas Mansur turut pula memberikan pidato sambutan, antara lain ia mengatakan bahwa Hindia Belanda dapat bebas dari cengkeraman Belanda adalah berkat Dai Nippon (Soedarno 1982, 15). Putera baru mulai berjalan tanggal 16 April 1943, gerakan yang bermarkas besar di Jalan Sunda 18 (kini Jalan Gereja Theresia) memiliki empat departemen dengan dua belas seksi. Keempat departemen itu adalah Departemen Perencanaan dan Perhubungan di bawah Bung Hatta, Departemen Kebudayaan di bawah Ki Hajar Dewantara, dan Departemen Kesejahteraan Masyarakat di bawah Mas Mansur (Hatta 1971, 40-41). Putera didirikan Jepang dengan maksud untuk memberikan kepuasan bangsa Indonesia di bidang politik, sekaligus sebagai alat untuk mengeksploitir kekayaan Indonesia bagi keperluan Perang Asia Timur Raya. Perhatian dan minat masyarakat terhadap Putera untuk mencari berbagai bantuan dan keterangan ternyata di luar dugaan. Markas besar Putera yang mulai bekerja tanggal 17 April

1942 melebihi kapasitas, yaitu penuh sampai kewalahan. Semua itu menunjukkan betapa tinggi harapan rakyat pada Putera tulis Hatta dalam laporan tiga bulan pertama gerakan itu (Soedarno 1982, 16). Pada pertengahan tahun 1943 Jepang mulai banyak mengalami kekalahan dalam perang Pasifik. Oleh karena itu, Jepang bersikap lunak kepada bangsa-bangsa yang didudukinya. Perdana menteri Jepang Toyo di depan sidang Parellemen di Tokyo, 16 Juni 1943, menjelaskan bahwa Indonesia akan diberi kesempatan untuk ikut berperan dalam pemerintahan. Sebagai realisasinya, maka pada tanggal 5 September 1943 panglima tertinggi tentara Jepang membentuk Chou Sangi-in, yaitu sebuah lembaga semacam Dewan pertimbangan Agung, yang diketuai Bung Karno. Lembaga yang bertujuan memajukan usaha pemerintah dan memberi jawaban atas pernyataan panglima tertinggi ini sebenarnya tak lebih istimewa dari *Volksraad* pada zaman kolonial Belanda (Soedarno 1982, 33).

Selanjutnya pada tanggal 1 Maret 1944 dibentuklah Jawa Hokkoku (Himpunan Kebaktian Rakyat Jawa) yang bertujuan menghimpun segenap kekuatan di Jawa untuk mempercepat kemenangan akhir sesuai dengan amanat Panglima tertinggi Saiko Sikikan. Terbentuknya Jawa Hokkoku membuat empat serangkai mengumumkan peleburan Putera ke dalam badan baru, dan menyatakan berakhirlah sejarah dari organisasi Putera. Bung Karno kembali dilantik untuk menjadi ketua pada organisasi ini, sedangkan Mas Mansur, kendati namanya tertera sebagai salah seorang anggota pengurus umum wakil dari Masyumi tidak lagi memegang peranan penting dalam organisasi ini (Soebagijo 1982, 90).

Simpulan

Kontribusi K.H. Mas Mansur untuk mengantarkan kemerdekaan Indonesia diwujudkan baik dalam bidang gerakan sosial keagamaan untuk memajukan Islam maupun dalam bidang politik. Keterlibatannya dalam kedua bidang tersebut dianggap penting, dikarenakan sosial keagamaan dipandang sebagai sarana pemberdayaan masyarakat Islam untuk pegangan hidup, sementara di bidang politik adalah bagaian dari pembelaan Mas Mansur terhadap masyarakat dari

ketidakadilan pemerintah kolonial. Demikian pula, Mas Mansur menganggap bahwa untuk mencapai Indonesia merdeka perlu dibangun kesadaran politik, karena perlawanan terhadap penjajah tidak akan berhasil jika tanpa adanya kesadaran ini. Misalnya, perkembangan Partai Islam Indonesia (PII) yang pesat pada saat itu tidak bisa dilepaskan dari peran Mas Mansur sebagai pucuk pimpinan Muhammadiyah, dan enam dari dua belas anggota pengurusnya yang berasal dari Muhammadiyah. Jadi, di samping Mas Mansur aktif dalam organisasi sosial-keagamaan Muhammadiyah bahkan menjadi orang nomor satu, juga terlibat aktif dalam perpolitikan dan partai politik.

Mas Mansur juga terlibat aktif dalam bidang politik pada masa pendudukan Jepang. Mas Mansur bersama Bung Karno, Bung Hatta, dan Ki Hadjar Dewantara yang dijuluki empat serangkai menduduki posisi kunci dalam gerakan Putera (Pusat Tenaga Rakyat). Walaupun, Putera didirikan Jepang dengan maksud untuk memberikan kepuasan bangsa Indonesia di bidang politik, sekaligus sebagai alat untuk mengeksploitir kekayaan Indonesia bagi keperluan Perang Asia Timur Raya, akan tetapi organisasi ini posisinya penting dalam rangka mewujudkan politik kooperatif terhadap bangsa penjajah yang posisinya memang lebih kuat dibanding dengan bangsa pribumi.

Referensi

- Alfian. 1969. *Islamic in Indonesian Politics: The Muhammadiyah Movement during The Dutch Colonial Period 1912-1942*. University of Wisconsin.
- Anam, Choirul. 1999. *Pertumbuhan dan Perkembangan NU*. Bisma Satu Surabaya.
- Anis, M. Yunus, et al. n.d. *Kenalilah Pemimpin Anda*. PP Muhammadiyah Majelis Pustaka.
- Anwar, Rosihan. 1971. *Pergerakan Islam dan Kebangsaan Indonesia*. Kartika Tama.
- Aqsha, Darul. 2005. *Kiai Haji Mas Mansur (1896-1946): Perjuangan dan Pemikiran*. Erlangga.
- Dahm, Bernhard. 1971. *History of Indonesia in The Twentieth Century*. Translated by E.S. Falla. London.
- Departemen Penerangan RI. 1962. *Makin Lama, Makin Tjinta; Muhammadiyah Setengah Abad 1912-1962*. Departemen Penerangan.
- Dhofier, Zamakhsari. 1984. *Transisi Pesantren, Studi Tentang Pandangan Hidup Kiai*. LP3ES.
- Garraghan, Gilbert J., S.J. 1957. *A Guide to Historical Method*. Fordham University Press.
- Gottschalk, Louis. 1985. *Mengerti Sejarah*. Translated by Nugroho Notosusanto. UI Press.
- Hadikusumo, Djarnawi. 2010. *Matahari-Matahari Muhammadiyah: Dari K.H.A. Dahlan Sampai Dengan K.H. Mas Mansur*. Suara Muhammadiyah.
- Halim, Abdul. 1970. *Sejarah Perjuangan K.H. Abdul Wahab Chasbullah*. Penerbitan Baru.
- Hanafi, Sofyan, and Kuswono. 2020. "Kiprah dan Perjuangan K.H. Mas Mansur dalam Perserikatan Muhammadiyah Pada Tahun 1916-1946." *Jurnal Swarnadwipa* 4 (3).
- Hatta, Muhammad. 1971. *The PUTERA Reports: Problem in Indonesian-Japanese Wartime Cooperation*. Translated by William H. Frederick. Cornell University Modern Indonesia Project.
- Kiptiyah, Siti Mariatul. 2018. "Gagasan Kebangsaan dan Moderatisme K.H. Mas Mansur (1896-1946) dalam Tafsir Langkah Muhammadiyah." *JAWI* 1 (1). <http://dx.doi.org/10.24042/jw.v1i1.2969>
- Kuntowijoyo. 1999. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Benteng.
- Kutoyo, Sutrisno. 1976. *Pahlawan Nasional: K.H. Mas Mansur*. Proyek Biografi Pahlawan Nasional Depdikbud.
- Lueey, William Leo. 1958. *History: Method and Interpretation*. Loyola University Press.
- Nasution, Abdul Muluk. 1981. *Pemberontakan Rakyat Silungkang Sumatera Barat 1926-1927*. Mutiara.
- Noer, Deliar. 1990. *Gerakan Modern Islam di Indonesia, 1900-1942*. LP3ES.
- Pasha, Mustafa Kemal, and A. Adaby Darban. 2005. *Muhammadiyah Sebagai Gerakan Islam*. Citra Kasa Mandiri.

- Poesponegoro, Marwati Djoened, and Nugroho Notosusanto. 1993. *Sejarah Nasional Indonesia Jilid V*. Balai Pustaka.
- Pringgodigdo, A.K. 1984. *Sejarah Pergerakan Rakyat Indonesia*. Jakarta: Dian Rakyat.
- Raharjo, Dawam, ed. 1983. *Pesantren dan Pembaharuan*. LP3ES.
- "Roeslan Abdulgani: Kisah Perjalanan (Sebuah Otobiografi)." *Jawa Pos*, January 29, 1985.
- Ruslan, Heri. 2012. "KH Mas Mansur Ulama Karismatik dari Jawa Timur." *Republika*, August 4, 2012. <https://www.republika.co.id/berita/m87t2n/kh-mas-mansur-ulama-kharismatik-dari-jawa-timur-1>.
- Said, Saleh. n.d. *Kiyai Mas Mansur: Membuka dan Menutup Sejarahnya*. Penerbitan Budi.
- Soebagijo, I. N. 1982. *K.H. Mas Mansur Pembaharu Islam di Indonesia*. Gunung Agung.
- Soedarno, Noerhadi. 1982. *POETERA (Pusat Tenaga Rakyat)*. Tintamas.
- "Surat Keputusan dan Instruksi Hoofdbestuur Muhammadiyah." Yogyakarta, 1935.
- Wirjosukarto, Amir Hamzah. 1968. *Rangkaian Mutu-Manikam 1896-1946: Kumpulan Buah Pikiran Kiai Haji Mas Mansur*. Penyebar Ilmu & Al Ichsan.
- Wirjosukarto, Amir Hamzah, ed. 1992. *Kyai Haji Mas Mansur Kumpulan Karangan Tersebar*. Persatuan.